



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 28 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN AGAMA
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : HELDY TERRY ROGAHANG
2. Jabatan : WAKIL REKTOR BIDANG AKADEMIK DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA
3. NHK : 691237

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.579.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 204 m2/168 m2 di KAB / KOTA KOTA MANADO , HASIL SENDIRI Rp. 603.000.000
2. Tanah Seluas 300 m2 di KAB / KOTA KOTA MANADO , HASIL SENDIRI Rp. 753.000.000
3. Tanah Seluas 300 m2 di KAB / KOTA KOTA MANADO , HASIL SENDIRI Rp. 153.000.000
4. Tanah Seluas 300 m2 di KAB / KOTA KOTA BITUNG , HASIL SENDIRI Rp. 34.000.000
5. Bangunan Seluas 0 m2 di KAB / KOTA MINAHASA SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 36.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 130.000.000

1. MOBIL, DAIHATSU TERIOS Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 130.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 39.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 27.000.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 1.775.000.000

III. HUTANG Rp. 570.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.205.000.000



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 21 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN AGAMA
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : FARNO BILLY ARTHUR GERUNG
2. Jabatan : WAKIL REKTOR BIDANG ADMINISTRASI UMUM, PERENCANAAN DAN KEUANGAN
3. NHK : 503300

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	12.000.000
1. Tanah Seluas 5 m2 di KAB / KOTA MINAHASA UTARA, HASIL SENDIRI Rp. 12.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	178.500.000
1. MOTOR, YAMAHA IFD Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 3.500.000		
2. MOBIL, DAIHATSU TERIOS TERIOS 1.5 R M/T Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 175.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	31.820.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	26.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	248.320.000
III. HUTANG	Rp.	1.195.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	-946.680.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi



pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 18 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN AGAMA
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ANITA INGGRITH TUELA
2. Jabatan : WAKIL REKTOR BIDANG KEMAHASISWAAN DAN KERJASAMA
3. NHK : 975543

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	1.500.000.000
1. Tanah Seluas 276 m2 di KAB / KOTA KOTA MANADO , HASIL SENDIRI Rp. 760.000.000		
2. Tanah Seluas 248 m2 di KAB / KOTA KOTA MANADO , HASIL SENDIRI Rp. 320.000.000		
3. Tanah Seluas 540 m2 di KAB / KOTA KOTA MANADO , HASIL SENDIRI Rp. 420.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	53.000.000
1. MOTOR, HONDA NF100 SE Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000		
2. MOBIL, SUZUKI AV1414F DX MT Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	----
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	110.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.663.000.000
III. HUTANG	Rp.	300.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.363.000.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.